

ADA APA di PAPUA? atau: ADA APA di JAKARTA?

Seorang pengamat yang tak berprasangka pasti menjadi pusing membaca segala macam tanggapan atas Kongres Papua II¹. Kami memetik saja beberapa judul dari pers nasional:

“Kongres dianggap gagal” berita dari Istana Presidenan tgl. 31 Mei; “Kongres Rakyat Papua nyatakan keluar dari KNRI”, Astaga.com, 31 Mei; “Presiden sesalkan Kongres Rakyat Papua”, Kompas, 2 Juni “Presiden: Rakyat Papua tetap inginkan integrasi”, Jawa Pos, 3 Juni; “Presiden tolak hasil Kongres Papua; pemberitaan luar negeri sepihak”, Koridor.com, 3 Juni; “Arbi Sarait: pernyataan kemerdekaan tidak masuk akal”, Koridor.com, 3 Juni; “Akbar Tandjung: Deklarasi Kemerdekaan Papua akan ditindak tegas”, Kompas 4 Juni; “Amien Rais: masalah Papua lebih parah dibanding Krismon”; “Gus Dur tidak akui Kongres Rakyat Papua”, Suara Pembaruan, 5 Juni; “General Rusdiharjo, Kapolri, siap memindahkan unit-unit kepolisian dari Ambon ke Papua”, Kompas 6 Juni; “Kepala Kostrad: supaya Satgas Papua dibubar dan anggotanya ditangkap”, 6 Juni; “Australia mungkin ada di belakang gerakan separatis Papua, kata seorang ahli ekonomi”, Antara, 6 Juni; “Is Papua Australia’s next target?, pertanyaan Jakarta Post; “DPR tolak deklarasi Merdeka Papua”, Jakarta Post 7 Juni; “Dutch Government will not reconfirm handover of New Guinea”, ANP, 6 Juni; “President asks migrants not to leave Papua”, Antara, 7 Juni.

Tidak sulit untuk memperpanjang daftar tanggapan ini. Kalau ini belum cukup memusingkan seorang yang berusaha memahami apa yang ada, dia masih lebih rasa dipusingkan kalau dia sekaligus memperhatikan tanggapan dari para penguasa di Papua dalam pers setempat. Beberapa judul saja:

“Belum membentuk negara; Kapolda menilai hasil Kongres masih sebatas aspirasi”, Cepos, 5 Juni; “Pemda tak keberatan hasil kongres disosialisasikan”, Cepos, 6 Juni; “Pangdam nilai, hasil Kongres tak masalah”, Cepos, 7 Juni; “H. Raja Bukit, SH, Kakanwil Departemen Hukum dan Perundang-undangan Papua, menyatakan perjuangan Papua harus diteruskan”, 8 Juni.

Maka, di Papua tidak ada soal, dan hal ini masih diperkuat dengan pernyataan Pangdam waktu menanggapi usulan Pangkostrad tentang penambahan anggota TNI di Papua: “Papua tidak diperlukan lagi untuk ditambah personel keamanan (TNI) dan saya tidak pernah meminta satupun personel karena memang tidak ada apa-apa”, Cepos, 8 Juni.

Memang siapa masih bisa memahami berita-berita ini yang saling bertentangan? Ada apa di Jakarta? Menurut Pangdam/Muspida Papua tidak ada apa-apa di Papua, maka mesti ada sesuatu di Jakarta... Entah bagaimanapun juga terdapat hal-hal yang aneh dan yang patut dipertanyakan.

¹ Kongres ini diadakan di Jayapura, tgl. 29 Mei s/d 4 Juni 2000, dan dihadiri ribuan orang dinataranya 501 peserta yang mempunyai hak suara.

[1] Untuk sebagian penilaian terhadap Kongres, termasuk penolakan atas hasilnya, dibuat *sebelum* hasilnya diketahui. Kenapa? Waktu Kongres masih berjalan Kongres sudah dinilai: tidak representatif, dan dimanipulasi oleh “orang asing”. Tiba-tiba segala aspirasi Bangsa Papua dinilai lagi sebagai ungkapan segelintir orang. Memang lagu lama ini sudah sering terdengar dari mantan Gubernur Freddy Numberi, tetapi syukurlah beliau telah mengubah bahasanya. Siapa dapat menentukan apakah Kongres ini representatif? Sekurang-kurangnya dapat dinyatakan bahwa peserta (501 wakil rakyat dengan hak suara) menganggap diri sebagai utusan daerahnya, dan kalau ditanyakan kepada ribuan orang yang menyaksikan perjalanan Kongres ini, pastilah mereka akan menjawab bahwa mereka merasa terwakili sungguh-sungguh. Yang mungkin merasa tidak diwakili adalah segelintir orang yang jauh lebih radikal dan yang menuntut supaya pada akhir Kongres memang suatu negara merdeka dibentuk dan suatu pemerintah baru diangkat. Justru kekuatan Kongres terletak dalam dinamika demokratisnya yang membuat bahwa akhirnya dalam Kongres suatu aliran ‘yang tidak representatif’ (kelompok radikal) ditolak setelah selama Kongres diberikan waktu secukupnya kepada para jurubicaranya. Memang perdebatan yang sangat hangat. Apalagi akhirnya hasil Kongres dapat diterima pula oleh ‘segelintir orang radikal’ itu, karena mereka memahami bahwa mayoritas Bangsa Papua (yang bersikap moderat) ingin suatu pendekatan lain dan sangat mengharapkan supaya hasil pergumulannya menjadi bahan suatu dialog terbuka dan damai.

[2] Kemudian ‘peranan orang bule’ didalam Kongres ini. Menurut pengamatan kami yang mengikuti Kongres ini dengan setia, tidak ada “orang bule” kecuali mereka yang secara resmi menjalankan pekerjaannya sebagai wartawan, dan seorang pengamat resmi dari Kedutaan Amerika Serikat. Kenapa issue mengenai peranan ‘orang bule’ diangkat? Demi kepentingan apa dan siapa? Suatu teka-teki betul, dan sudah tentu kenyataan ‘on the spot’ tidak mendukung tuduhan yang ramai-ramai dilemparkan.

[3] Yang agak lucu juga sekaligus sangat menyedihkan bahwa selama hasil Kongres ditanggapi secara ramai, tidak pernah kami melihat bahwa resolusi final, yang menjadi keputusan Kongres, diterbitkan dalam salah satu harian nasional. Maka dapat dipertanyakan apakah semua pendapat betul-betul berdasarkan suatu analisa isi resolusi itu? Kenapa isi resolusi tidak disosialisasikan, sedangkan ungkapan-ungkapan yang mudah mengelirukan dicetak terus dengan huruf-huruf besar? Kalau mesti percaya pada judul-judul yang dilemparkan melalui pers nasional, Tanah Papua sudah dalam keadaan bebas lepas dan pastilah serbakacau. Kenyataannya: di Papua semuanya tenang saja. Kenapa? Karena Bangsa Papua tidak merasa bahwa telah membuat sesuatu yang tidak betul. Memang diberikan kesempatan untuk mengungkapkan aspirasinya, malahan didorong oleh Presiden sendiri, dan aspirasinya memang diungkap dengan jelas (yang isi pokoknya tidak berbeda dengan pernyataan yang terungkap di depan Presiden Habibi pada tanggal 26 Februari 1999). Lantas

Bangsa Papua mengundang segala instansi yang terkait untuk duduk bersamanya dan melihat/memeriksa apa yang benar.

[4] Bangsa Papua melalui Kongresnya menarik perhatian pada sejumlah hal yang menurut penilaiannya perlu dibetulkan; sejarah perlu diluruskan. Para peserta Kongres meminta perhatian atas empat kenyataan de facto:

[a] bahwa pada tahun 1961 Bangsa Papua sudah diberikan kedaulatan;

[b] bahwa Bangsa Papua tidak terwakili sewaktu New York Agreement ditetapkan pada tahun 1962;

[c] bahwa Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) tahun 1969 bercacat hukum dan dilaksanakan disertai intimidasi dan penindasan;

[d] bahwa ada sejarah pelanggaran HAM selama 38 tahun terakhir ini yang tidak pernah ditangani secara hukum.

Ungkapan serta permintaan perhatian ini merupakan langkah awal dari proses pencarian kebenaran, dan proses itu perlu dijalankan bersama. Begitulah nada dasar resolusi. Kenapa ungkapan isi hati ini disertai undangan yang ikhlas ini begitu sulit didengar?

Dalam salah satu tulisan kecil, Tom Beanal, salah seorang tokoh pejuang aspirasi Bangsa Papua, menulis sebagai berikut: "Bila dari kebenaran mutlak kita temukan bahwa kita (Bangsa Indonesia) benar, maka kita (Bangsa Papua) harus berani dan jujur, dan dengan rendah hati menerima kenyataan itu, dan dengan rendah hati pula meminta maaf atas tindakan kita yang tidak baik terhadap Bangsa Indonesia. Tetapi sebaliknya, kalau ternyata kita temukan bahwa kita bukan Bangsa Indonesia, maka itu harus diakui kebenarannya, baik oleh Bangsa Indonesia maupun bangsa-bangsa lain di dunia, sehingga kita boleh merdeka".²

Ternyata Bangsa Papua siap untuk mencari kebenaran. "Jakarta" bagaimana... ada apa??

Jayapura, 8 Juni 2000

Theo van den Broek ofm

Direktur Sekretariat Keadilan & Perdamaian, Keuskupan Jayapura

² Dalam "Kata Hati Tom Beanal", Juni 2000, hlm. 9-10.